

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat.¹ Jadi hakekatnya pendidikan adalah proses pengembangan karakter, sebagaimana yang ditulisnya:

“Budi pekerti, watak atau karakter, itulah bersatunya gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, yang lalu menimbulkan tenaga.... Dengan adanya ‘budi pekerti’ itu tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi), yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Inilah manusia yang beradab dan itulah maksud dan tujuan pendidikan dalam garis besarnya”.²

Pemahaman yang baik atas istilah tersebut pada hakikatnya akan mempermudah pula memahami apa dan bagaimana kurikulum merdeka diimplementasikan pada proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Allah SWT menggambarkan konsep pengajaran ini dalam Surat Al-Baqarah ayat 3, berikut:³

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar” (Q.S. Al-Baqarah: 31).

¹ Ki Hajar Dewantara, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka* (Jogjakarta: UST-Press, 2013), 25.

² Ki Hajar Dewantara, *Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka*, 20-21.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006) 6.

Pada ayat tersebut, maka komparasi kurikulum merdeka belajar dan Al-Quran ini sesungguhnya tidak ada sekat yang diklasifikasikan oleh Allah dalam mengajarkan Adam AS. Allah SWT mengajarkan ilmu kepada Adam AS, dengan konsep mengajarkan ilmu secara *kullaha* (seluruhnya).⁴

Salah satu program pengembangan percepatan penerapan Kurikulum Merdeka sejak dimulainya pada tahun 2022 adalah dengan adanya Program Sekolah Penggerak. Tujuan Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).⁵

Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Profil ini sederhana, mudah diingat dan dijalankan baik oleh pendidik maupun oleh pelajar agar dapat dihidupkan dalam kegiatan sehari-hari. Berdasarkan pertimbangan tersebut, profil pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, yaitu: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 2) mandiri, 3) bergotong-royong, 4) berkebinekaan global, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif.⁶

Sistem pendidikan di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar lebih dari sekedar mewujudkan profil pelajar Pancasila, melainkan meningkatkan kualitas pendidikan. Ada kebutuhan untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut selaras dengan berbagai aspek kehidupan lainnya. Kepala sekolah dan guru tidak hanya perlu menguasai teknik pengembangan pembelajaran, tetapi juga pendekatan dalam membangun kedisiplinan dalam proses belajar mengajar di

⁴ Leu, B, "Komparasi kurikulum merdeka belajar dan Al-Quran surat Al Baqarah ayat 31", *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 11 (2) (2022): 113-128.

⁵ Kemendikbudristek, *Program Sekolah Penggerak* (2021). <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/> (diakses tanggal 29 Maret 2024)

⁶ Kepala Badan, Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, *Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka* (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022), 2.

sekolah. Kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan strategis harus mampu mengembangkan budaya positif sekolah dalam melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin haruslah senantiasa berpikir, bersikap dan perilaku tertentu sehingga visi yang telah direncanakan dapat tercapai.⁷

Saat ini situasi pendidikan di Indonesia tercermin dari hasil asesmen nasional yang memfokuskan pada penilaian kompetensi literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Hasil dari asesmen nasional ini digunakan sebagai laporan pendidikan Indonesia yang menggabungkan berbagai data pendidikan. Laporan ini bermanfaat untuk membantu sekolah dan dinas pendidikan dalam mengidentifikasi pencapaian pendidikan, akar masalah, dan tantangan pendidikan, serta untuk melakukan evaluasi dan merencanakan perbaikan yang efektif berdasarkan data yang ada.

Fenomena berdasarkan hasil survei lingkungan belajar tahun 2021, kualitas pembelajaran pendidik Indonesia relatif baik dalam memberikan dukungan afektif pada peserta didik sebanyak 37%, yaitu percaya pada potensi peserta didik dengan memberikan perhatian dan peduli dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Tetapi ada catatan penting perlunya peningkatan pada kemampuan manajemen kelas, yaitu pada penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas, serta pada aktivasi kognitif, yaitu pembelajaran yang interaktif dan sesuai kemampuan peserta didik. Data menunjukkan bahwa hanya 2% manajemen kelas dan 1% aktivasi kognitif sudah membudaya.⁸ Artinya ada indikator yang harus mendapatkan perhatian serius yaitu dalam hal penerapan disiplin positif siswa dan aktifitas pembelajaran.

Hasil survei iklim keamanan sekolah menunjukkan bahwa terdapat 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan, 22,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden kekerasan seksual, 68% satuan pendidikan perlu penguatan dan peningkatan sikap kebhinekaan, serta masih perlu ditingkatkannya manajemen kelas disiplin positif untuk mendukung kualitas

⁷ Duryat, P. S.; Duryat, "M. Paradigma Baru Manajemen Sekolah di Era Revolusi Industri 4.0," (Vol. 1). (CV Alfabeta. DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4>, 2019), 3433.

⁸ Kemendikbudristek, *Disiplin Positif untuk Merdeka Belajar* (Jakarta: UNICEP-Yayasan Setara, 2022), 2.

pembelajaran yang baik.⁹

Bahkan fenomena perundungan sudah sering kali terjadi dan pemberitaannya pun massif dan viral. Menurut data yang tercatat dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat tahun 2020 sebanyak 119 kasus. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan 226 kasus bullying pada tahun 2022.¹⁰

Anak-anak di Indonesia menjadi korban kekerasan di rumah, sekolah dan masyarakat, baik dari teman sebaya maupun orang dewasa. Lembaga *Save The Children* Swedia menemukan bahwa sekolah di Indonesia menggunakan 65 bentuk hukuman fisik dan 38 hukuman emosional. Guru sering kali menggunakan hukuman dalam bentuk kekerasan fisik dan emosional untuk mendisiplinkan peserta didik (UNESCO, 2021).¹¹

Dampak fenomena tersebut peserta didik menjadi kehilangan rasa aman dan nyaman. Mereka mungkin merasa takut dan khawatir akan kemungkinan menerima hukuman atau perlakuan yang tidak adil di sekolah. Pemberian hukuman malah membuat peserta didik tidak menyukai disiplin, karena menimbulkan perasaan marah, terhina, dan tidak dihargai. Hal ini dapat menghambat iklim belajar yang positif dan mempengaruhi keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hukuman dari guru yang berfokus pada kesalahan dan pelanggaran sering kali tidak mendorong peserta didik untuk belajar dengan motivasi yang tinggi.

Hal tersebut sejatinya menunjukkan pada sikap karakter yang dibentuk dari pola yang diciptakan oleh lingkungan itu sendiri baik oleh lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Oleh karena itu sejatinya perlu perhatian

⁹ Kemendikbudristek, *Disiplin Positif untuk Merdeka Belajar*, 3.

10

Data KPAI Kasus Bullying Makin Meningkat 226 di 2022, *Berita Satu* (Jakarta: 1 oktober 2023). <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/28775/data-kpai-kasus-bullying-makin-meningkat-> (diakses 12 Mei 2024)

¹¹ Adlan Surya Saputra, "Menumbuhkan Disiplin Diri Melalui Disiplin Positif Restitusi". *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 09.02 (2023): 2614-7221.

khusus pada pola pendekatan perilaku pendidiknya dalam membentuk karakter murid. Sementara terbentuknya karakteristik itu dapat terjadi tercapai apabila sekolah mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah.

Pentingnya disiplin bagi siswa adalah dapat memahami batas-batas norma dan mampu berperilaku sesuai dengan batasan norma tersebut, dengan kata lain anak dapat mengendalikan diri dari perilaku yang menyimpang (*misbehave*). Upaya sekolah dengan membuat tata tertib sekolah belum berbanding lurus dengan kenyataannya karena masih banyak siswa yang kurang memperhatikan kedisiplinan. Kedisiplinan siswa merupakan suatu masalah di hampir banyak sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai pelanggaran aturan dan tata tertib sekolah yang dilakukan siswa, seperti masih banyak siswa yang datang terlambat ke sekolah, sering membolos, kurang menghargai, merusak fasilitas sekolah, perilaku *bullying*, mencontek, hingga pada pertikaian antar siswa.

Disiplin dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu, disiplin internal dan disiplin eksternal. Disiplin internal disebut sebagai disiplin yang positif, sedangkan disiplin eksternal disebut sebagai disiplin negatif. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hurlock terdapat dua konsep mengenai disiplin, yaitu disiplin positif dan disiplin negatif. Disiplin negatif adalah disiplin yang berhubungan dengan kontrol seseorang berdasarkan otoritas luar biasa yang dilakukan secara terpaksa, dan dengan cara yang kurang menyenangkan atau dilakukan karena takut akan hukuman (*punishment*). Sedangkan disiplin positif yaitu pendidikan dan bimbingan. Karena menekankan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri (*inner growth*) yang mencakup disiplin diri (*self discipline*) dan pengendalian diri (*self control*).¹²

Disiplin positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dapat diterapkan di sekolah. Disiplin positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Padahal William Glasser (2015), meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol,

¹² Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 120.

pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori Kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai.¹³

Banyak fakta yang terjadi di lingkungan sekolah ketika murid mendisiplinkan diri atas dasar kepatuhan terhadap tata tertib karena ada hukuman bagi yang melanggarnya, maka yang mengontrol atas dirinya adalah takut hukuman atau karena ingin mendapatkan penghargaan. Takut terhadap hukuman atau karena mendapat hadiah artinya bahwa lahirnya perilaku disiplin murid tersebut karena pengaruh dari luar dirinya (ekstrinsik), bukan karena ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini dalam dirinya (instrinsik), sehingga mendorongnya untuk berperilaku disiplin.

Diane Gossen (2001) menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu: (1) Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, (2) Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan (3) Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.¹⁴ Motivasi ekstrinsik memiliki efek kedisiplinan yang bersifat jangka pendek, sementara motivasi instrinsik bersifat positif dan berjangka panjang yang cenderung membudaya dan menjadi karakter.

Materi tentang disiplin positif itu sendiri pada kurikulum Merdeka menjadi salah satu materi pokok yang harus mampu dipahami oleh seluruh *stakeholder* satuan pendidikan karena budaya positif adalah usaha kolaboratif dari seluruh komponen pendidikan dalam rangka mewujudkan iklim sekolah yang berkarakter yang dapat meningkatkan mutu pendidikan dan membangun peradaban bangsa.

Penerapan pendekatan disiplin positif sekolah pada implementasi kurikulum Merdeka merupakan salah satu titik fokus penerapan budaya positif di

¹³ Kemendikbudristek, *Disiplin Positif untuk Merdeka Belajar*, 12

¹⁴ Kemendikbudristek, *Disiplin Positif untuk Merdeka Belajar*, 23-24.

setiap Sekolah Penggerak (SP) khususnya, kemudian para guru penggerak yang terpilih mengikuti diklat Program Guru Penggerak (PGP), dan umumnya satuan pendidikan yang sedang mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar dalam rangka mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.

Pendekatan disiplin positif memiliki relevansi yang kuat dengan iklim keamanan, iklim kebhinekaan, serta kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan yang membuat peserta didik dapat memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Peserta didik akan menyadari sebab dan akibat yang berpengaruh dari apa yang dilakukannya, sehingga dapat menjauhkan diri dari bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi serta tindakan lainnya yang menyimpang.

Hasil observasi awal menunjukkan dalam menerapkan disiplin positif siswa di salah satu sekolah penggerak di kabupaten Purwakarta, yaitu SMPIT Cendikia Purwakarta terdapat beberapa problematika. Permasalahan sebelum diterapkannya kurikulum merdeka yang dimaksud diantaranya, (1) Banyaknya pelanggaran terhadap tata tertib sekolah (indisipliner), seperti banyaknya siswa yang sering terlambat hadir di sekolah, kurang bertanggung jawab dalam tugas, kurangnya kesadaran menjaga kebersihan dan ketertiban, (2) Siswa disiplin dan patuh pada aturan karena takut hukuman atau sanksi bukan atas kesadaran, (3) Motivasi belajar yang tidak konsisten, (4) sering terjadi perilaku bullying, dan (5) Berkurangnya nilai-nilai etika.

Berdasarkan uraian fenomena tersebut, tentu menciptakan budaya sekolah melalui penerapan disiplin positif ini sangat diperlukan untuk menangkal fenomena *misbehave* yang sudah dipaparkan sebelumnya. Untuk itulah dibutuhkan komitmen dan dukungan dari pemangku kebijakan sekolah sebagai bagian dari fungsi dan peran strategis manajerial. Aktor tersebut adalah Kepala Sekolah. Tugas dan fungsi kepala sekolah sebagaimana dalam Permendikbud nomor 6 tahun 2018 pasal 15 bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan

meningkatkan mutu sekolah berdasarkan delapan standar nasional pendidikan.¹⁵

Kebijakan pendidikan yang diambil kepala sekolah sangat penting dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan.¹⁶

Kebijakan kepala sekolah adalah keputusan yang diambil oleh kepala sekolah dengan bijaksana untuk menentukan kegiatan dan program guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Sebagai pemimpin dan manajer, kepala sekolah bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Kepala sekolah dalam membuat kebijakan dapat mengacu pada tahapan yang sistematis. Menurut Putt dan Springer dalam Syafaruddin (2008), ada tiga tahapan dalam pembuatan kebijakan, yaitu: (1) Formulasi kebijakan; (2) Implementasi kebijakan; dan (3) Evaluasi kebijakan.¹⁷ Ketiga tahapan ini dapat menjadi dasar pijakan kepala sekolah dalam memutuskan sebuah kebijakan yang akan diterapkan di sekolah.

Pada tahap memformulasikan kebijakan menurut Winarno (2012), aktifitas yang dilakukan yaitu merumusan masalah yaitu proses mengidentifikasi masalah. Masalah yang sudah teridentifikasi dan dirumuskan kemudian masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah yang sudah diidentifikasi kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Setelah pemecahan masalah sudah ditemukan, maka tahap akhir formulasi adalah penetapan kebijakan.¹⁸

Pada tahap implementasi kebijakan, menurut Edward III dalam Widodo (2010), ada empat faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau

¹⁵ Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, *Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah* (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemhumham RI, 2018)

¹⁶ Dunn, William N.. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Jogjakarta: cetakan kelima. Gajah Mada Universitas Press, 2013), 23.

¹⁷ Syafaruddin, *Evektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah yang Efektif* (Jakarta: Rineka, 2008), 81.

¹⁸ Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 2012), 122-125.

sikap, dan struktur birokrasi.¹⁹ Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan. Baik berfungsi dalam memudahkan pelaksanaan kebijakan dan dapat pula mempengaruhi proses pelaksanaan sehingga kurang berhasil.

Setelah tahap implementasi kebijakan, kemudian diadakan evaluasi sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada semua pihak terkait. Menurut Stufflebeam (1973), bahwa evaluasi mencakup evaluasi konteks, input atau masukan, proses, dan produk atau hasil dari penerapan kebijakan tersebut.²⁰ Dengan demikian evaluasi kebijakan semata-mata bersifat positif dan konstruktif.

Menurut peneliti permasalahan yang terjadi berdasarkan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya sangat menarik untuk diteliti, karena itu peneliti ingin meneliti dengan fokus pada bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa untuk menciptakan budaya sekolah dan mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMPIT Cendekia Purwakarta yang berstatus sebagai sekolah penggerak yang didorong untuk menjadi *role model* mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila.

Program Sekolah Penggerak sendiri berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).²¹ Kepala sekolah penggerak dituntut untuk berkolaborasi dalam *community of practice* dengan kepala sekolah penggerak lain. Selain itu kepala sekolah penggerak akan mendapatkan pelatihan manajemen dan *instructional leadership*.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Secara substansial, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa. Objek

¹⁹ Widodo, J., *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 96.

²⁰ Misykat Malik Ibrahim, *Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan* (Makasar: Alauddin University Press, 2018), 19-20.

²¹ Kemendikbudristek, *Program Sekolah Penggerak* (2021) <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/> (diakses tanggal 15 Maret 2024)

penelitian tentang kebijakan sekolah dalam penerapan disiplin positif siswa adalah bentuk kebaruan dalam penelitian ini dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam secara deskriptif kualitatif mengenai “**Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menerapkan Disiplin Positif Siswa di Sekolah Penggerak SMPIT Cendekia Purwakarta**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa di sekolah penggerak SMPIT Cendekia Purwakarta?
2. Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa di sekolah penggerak SMPIT Cendekia Purwakarta?
3. Bagaimana evaluasi kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa di sekolah penggerak SMPIT Cendekia Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang peran kepala sekolah penggerak dalam penerapan budaya positif sekolah pada kurikulum merdeka memiliki tujuan dan manfaat tertentu yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui formulasi kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa di sekolah penggerak SMPIT Cendekia Purwakarta.
4. Mengetahui implementasi kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa di sekolah penggerak SMPIT Cendekia Purwakarta.
5. Mengetahui evaluasi kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa di sekolah penggerak SMPIT Cendekia Purwakarta.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah

manfaat dan kegunaan baik dari aspek teoritis maupun dari aspek praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini di dapat dijadikan pemikiran untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang kajian ilmu Manajemen Pendidikan Islam. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi sumber informasi dan acuan berbagai kajian teoritis yang berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif di sekolah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut.

- a. Bagi kepala sekolah, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau pertimbangan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia dalam hal membuat kebijakan dalam penerapan disiplin positif di sekolah.
- b. Memberikan kontribusi sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah dalam memberikan motivasi kepada para guru dalam menciptakan disiplin positif di sekolah.
- c. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis.

E. Kerangka Pemikiran

Peneliti dalam menguraikan penelitian untuk mengetahui gambaran secara kualitatif dalam penelitian ini tidak lepas dari kerangka berpikir berdasarkan teori yang ada dari para ahli, sehingga menjadi acuan peneliti dalam menguraikan penelitian ini.

Adapun kerangka teori tahapan membuat kebijakan publik yang digunakan peneliti, yaitu teori dari Putt dan Springer (1989), bahwa ada tiga tahap membuat kebijakan, yaitu tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi

kebijakan.²² Tahapan ini juga dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam membuat kebijakan di sekolah.

Pada tahap memformulasikan kebijakan menurut Winarno (2012), aktifitas yang dilakukan yaitu proses perumusan masalah. Proses perumusan masalah ini berfokus pada proses identifikasi masalah. Masalah yang sudah teridentifikasi dan dirumuskan kemudian masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah yang sudah diidentifikasi kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Setelah pemecahan masalah sudah ditemukan, maka tahap akhir formulasi adalah penetapan kebijakan.²³

Pada tahap implementasi kebijakan, menurut Edward III dalam Widodo (2010), ada empat faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.²⁴ Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan. Baik berfungsi dalam memudahkan pelaksanaan kebijakan dan dapat pula mempengaruhi proses pelaksanaan sehingga kurang berhasil.

Setelah tahap implementasi kebijakan, kemudian diadakan evaluasi sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada semua pihak terkait. Pada tahap evaluasi ini, peneliti mengacu pada model evaluasi Stufflebeam (1973), yaitu CIPP (*Context* atau konteks, *Input* atau masukan, *Process* atau proses, and *Product* atau hasil).²⁵

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan sebagai acuan peneliti dalam mengaplikasikan penelitian ini. Kerangka pemikiran teoritis tersebut akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu “Kebijakan Kepala Sekolah dalam Menerapkan Disiplin Positif di Sekolah

²² Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan, Konsep, Strategi dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah yang Efektif*, 81.

²³ Winarno, Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Pressindo. 2012), 122-125.

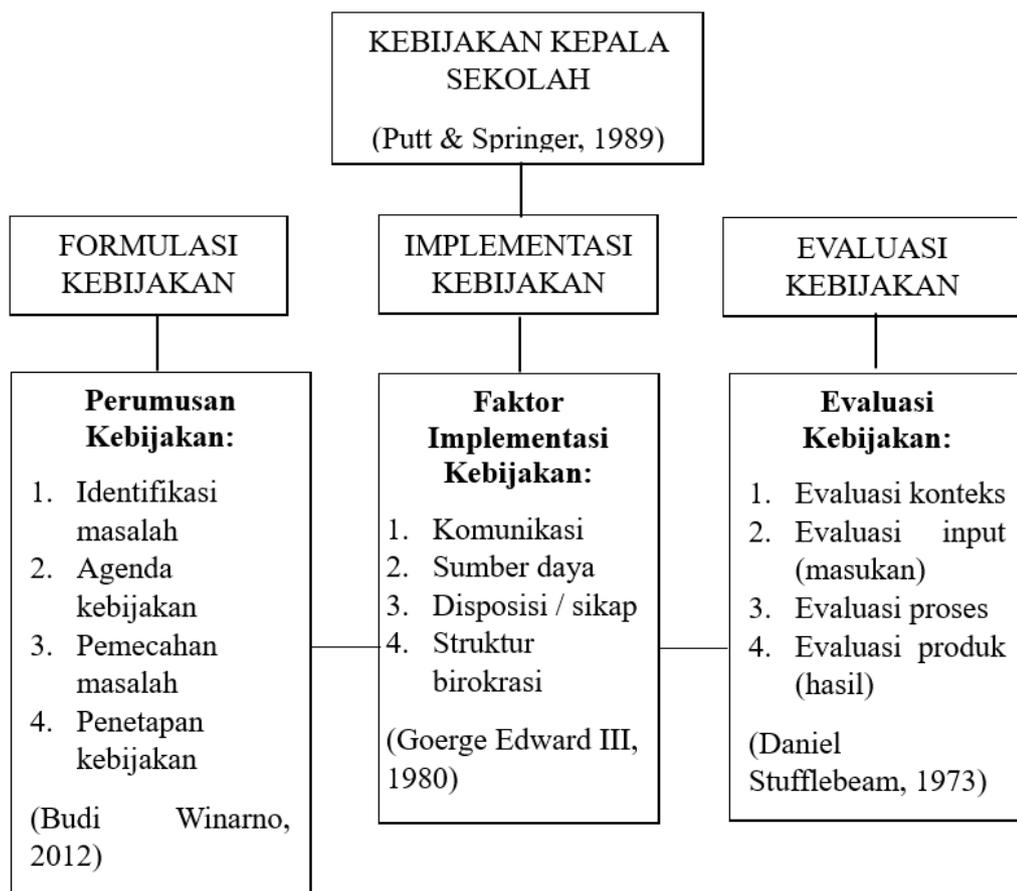
²⁴ Widodo, J., *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), 96.

²⁵ Misykat Malik Ibrahim, *Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan*, 19-20.

Penggerak di SMPIT Cendekia Purwakarta”.

Kerangka berpikir tentang pentingnya penelitian kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan disiplin positif siswa di sekolah penggerak SMPIT Cendekia Purwakarta secara garis besar digambarkan dalam bagan 1.1 berikut:

Bagan 1.1. Kerangka Berpikir



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian dari beberapa penelitian sebelumnya yang pernah melakukan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hal ini bertujuan untuk melengkapi penelitian sehingga dapat memperbanyak wawasan dalam penelitian yang sama.

1. Jurnal yang ditulis oleh Septi Yani dkk tahun 2020, berjudul “Kebijakan Sekolah Dalam Penerapan Karakter Disiplin Siswa Di SDN 77 Rejang

Lebong”. Penelitian kualitatif ini menyimpulkan bahwa penerapan pendidikan karakter disiplin diintegrasikan dalam mata pelajaran dengan ketentuan sesuai dengan materi dan tujuan yang akan dicapai dan Budaya sekolah yang meliputi budaya kelas, budaya kelas, yaitu budaya yang berkenaan dengan penerapan pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab yang terlihat dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di dalam kelas dan maupun di luar kelas.²⁶

2. Jurnal yang ditulis oleh Laesti Nurishlah, dkk tahun 2022, berjudul “Implementasi Disiplin Positif di SD/MI”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa disiplin positif memberikan manfaat yang signifikan bagi guru dan siswa di SD/MI, membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi, dan memberdayakan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara aktif, sekolah dapat berhasil menerapkan disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi, dan mendukung bagi semua siswa. Melalui disiplin positif, siswa belajar nilai-nilai seperti tanggung jawab, kerjasama, dan integritas. Ini membantu mereka menjadi individu yang baik dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan demikian, implementasi disiplin positif di SD/MI dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi guru dan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi, dan memberdayakan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran.²⁷
3. Jurnal yang ditulis oleh Ni Ketut Sri Eka Utari tahun 2023, berjudul “Penerapan Disiplin Positif Melalui Kesepakatan Kelas Untuk Meningkatkan Disiplin Belajar Pada Siswa Tuna Grahita”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas dapat meningkatkan disiplin belajar siswa. Penerapan disiplin positif melalui

²⁶ Yani, Septi, dkk. "Kebijakan sekolah dalam penerapan karakter disiplin siswa di SDN 77 Rejang Lebong." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2.3 (2020): 99-115.

²⁷ Nurishlah, Laesti, Subiyono Subiyono, and Iis Hasanah. "Implementasi Disiplin Positif di SD/MI." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8.12 (2022): 643-655.

kesepakatan kelas membuat siswa dengan sendirinya mengurangi perilaku tidak disiplinnya. Disiplin belajar siswa mulai meningkat ditandai dengan perilaku positif yang mulai ditunjukkan siswa.²⁸

4. Jurnal yang ditulis oleh Dwi Enik Nuzul Chodariyah, dkk tahun 2024, berjudul “Analisis Penerapan Karakter Disiplin Positif Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan karakter disiplin positif pada siswa kelas satu. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah siswa kelas 1 SDN Muntilan. Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi terhitung dari bulan Agustus hingga bulan November, dan melakukan wawancara kepada subjek penelitian. Data tersebut diolah dengan menggunakan teori disiplin positif analisis dari peneliti. Peneliti menguji apakah penerapan dapat diterima oleh murid dengan baik atau tidak. Perolehan data murid yang mampu mentaati peraturan menunjukkan lebih dari 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan yang dilakukan guru kelas 1 mampu menolong murid memiliki sikap disiplin.²⁹
5. Jurnal yang ditulis oleh Efi Ika Febriandari tahun 2018, berjudul “Penerapan Metode Disiplin Positif Sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter Disiplin Anak SD”. Berdasarkan hasil kajian studi pustaka kekerasan berdampak negatif untuk anak menyebabkan pelajaran mereka terganggu, mereka keluar dari sekolah, mengadopsi perilaku kekerasan dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Melalui metode pengajaran disiplin positif memberikan alternatif pada guru dan pendidik untuk menerapkan pendidikan tanpa kekerasan. Disiplin positif memberikan alternatif serta strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pendidik dalam melakukan tugas sehari-hari bersama anak. Dengan penerapan metode disiplin positif mendisiplinkan anak tanpa hukuman dan kekerasan dapat memberikan pembinaan terhadap

²⁸ Ni Ketut Sri Eka Utari, “Penerapan Disiplin Positif Melalui Kesepakatan Kelas Untuk Meningkatkan Disiplin Belajar Pada Siswa Tunagrahita”, *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, Vol 1.1 (2023), 2988-7852

²⁹ Dwi Enik Nuzul Chodariyah, dkk, “Analisis Penerapan Karakter Disiplin Positif Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar”, *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9.1 (2024), 2548-6950.

pendidikan karakter anak SD. Guru dapat menerapkan disiplin kepada anak dengan menguatkan perilaku positif, sehingga anak dapat bertanggung jawab atas perilakunya sendiri tanpa merasa dipaksa.³⁰

6. Jurnal yang ditulis oleh Mujiono Sang Putra tahun 2019, berjudul “Kebijakan dan Aturan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Kedisiplinan Peserta Didik di SMAN 2 Dompu.” Hasil penelitian kualitatif ini menyimpulkan bahwa Kebijakan sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik SMAN 2 Dompu pada dasarnya sekolah telah menerapkan tata tertib dan peraturan sekolah yang tertuang dalam tata tertib dan peraturan sekolah. Tata tertib dan peraturan sekolah tersebut disosialisasikan kepada guru, staf tata usaha, dan karyawan. Kebijakan tata tertib dan peraturan sekolah bertujuan untuk menepis dan membuat efek jera peserta didik dengan memberikan bentuk sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.³¹
7. Jurnal yang ditulis oleh Mistina Hidayati dan Abdul Wahid Bambang Suharto tahun 2021, berjudul “Penerapan Disiplin Positif Dalam Pembelajaran Jarak Jauh di SMP Negeri 1 Banyumas”. Penerapan disiplin positif murid dalam PJJ pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Banyumas yaitu diawali dengan penyusunan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Penyusunan kesepakatan kelas mendapat respon yang baik dari murid, sebanyak 86,95% ikut berkontribusi memberikan masukan untuk disepakati. Hasil penerapan kesepakatan kelas berpengaruh langsung kepada guru dan murid. Secara umum penanaman disiplin positif ini memiliki pengaruh yang positif. Berdasarkan hasil penelitian, kedisiplinan murid juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dilihat dari dokumen nilai tugas dan respon presensi di *google form* melalui *classroom* sebesar 86% mengumpulkan tugas tepat waktu dan 90% presensi tepat waktu. Hasil angket dengan murid melalui *Google Form* yang dibagikan guru terkait penerapan disiplin positif juga

³⁰ Efi Ika Febriandari, “Penerapan Metode Disiplin Positif Sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter Disiplin Anak”, *Karya Ilmiah Dosen* 1.1 (2018).

³¹ Putra, Mujiono Sang. "Kebijakan dan Aturan Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Kedisiplinan Peserta Didik di SMA N 2 Dompu", *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 3.2 (2019): 63-68.

mendapatkan respon yang sangat baik, yaitu sebesar 96,73 % murid menanggapi positif. Meskipun penerapan disiplin positif ini mendapatkan respon yang sangat baik, namun secara berkala perlu ditinjau ulang kesepakatan kelas untuk disesuaikan lagi dengan kondisi saat itu dan dilakukan refleksi untuk peningkatan kedisiplinan.³²

8. Jurnal yang ditulis oleh Devi Lestari, Biya Ebi Praheto dan Setiowati tahun 2023, berjudul Penerapan Budaya Positif dalam Mewujudkan Karakter Profil Pelajar Pancasila pada Siswa di SDN 4 Kelapa Kampit. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penerapan budaya positif pada siswa oleh pihak sekolah di SD Negeri 4 Kelapa Kampit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan pihak sekolah dalam menerapkan budaya tersebut, seperti menanamkan pembiasaan positif dengan jumat berkah yaitu berdonasi setiap hari jum'at untuk memberikan bantuan kepada kalangan yang kurang mampu, menyayikan lagu daerah sebelum mulai pembelajaran, melaksanakan piket bersama atau kerja bakti di sekolah, melibatkan siswa untuk menjadi petugas upacara bendera dan mengikuti ekstra kurikuler berupa pramuka dan pencak silat dalam rangka meningkatkan karakter mandiri siswa, memberikan pertanyaan persoalan masalah untuk melatih bernalar kritis siswa dalam mengemukakan ide-ide dan gagasan dalam materi pembelajaran, dan melakukan praktik-praktik pembuatan karya seni, seperti membuat kolase, bunga, dan sebagainya untuk mengembangkan kreatifitas siswa.³³
9. Jurnal yang ditulis oleh Akmal Rijal tahun 2023, berjudul "Internalisasi Nilai Karakter Disiplin Untuk Menumbuhkan Budaya Positif di Lingkungan Sekolah di SD Negeri 11 and 36 Lubuk Linggau." Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan karakter disiplin

³² Hidayati, Mistina, and Abdul Wachid Bambang Suharto. "Penerapan disiplin positif dalam pembelajaran jarak jauh di smp negeri 1 banyumas." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* vol 1.1 (2021): 9-22.

³³ Lestari, D., Praheto, B. E., & Setiowati, S., "Penerapan Budaya Positif dalam Mewujudkan Karakter Profil Pelajar Pancasila Pada Siswa Di SD Negeri 4 Kelapa Kampit", In *Prosiding Seminar Nasional PGSD, UST* Vol. 1, No. 1 (Mei 2023): 70-74.

untuk menumbuhkan budaya sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dengan manajemen *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan). Perencanaan program kedisiplinan yaitu dengan melibatkan seluruh guru, orang tua dan komite sekolah sehingga kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan dapat diatasi, perencanaan ini memuat atau menyesuaikan visi, misi dan tujuan sekolah. Kemudian menurut kepala sekolah langkah kedua yaitu melakukan pengorganisasian program disiplin sekolah perlu dilakukan untuk mensosialisasikan hasil penyusunan tata tertib yang telah disepakati bersama. Penerapan atau pelaksanaan disiplin siswa di SDN 11 Kota Lubuklinggau dilakukan dengan pendekatan penanganan masalah disiplin yaitu dengan cara memberikan pengertian terhadap maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan sehingga siswa dapat memahami keuntungan dan kerugian dari tindakannya. Langkah terakhir yaitu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.³⁴

Adapun relevansi dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1. Relevansi dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
1	“Penerapan Disiplin Positif Melalui Kesepakatan Kelas Untuk Meningkatkan Disiplin Belajar Pada Siswa Tuna Grahita” , Ni Ketut Sri Eka Utari, 2023, Metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas dapat meningkatkan disiplin belajar siswa. Penerapan disiplin positif melalui kesepakatan kelas membuat siswa dengan sendirinya mengurangi perilaku tidak	Relevansinya, yakni sama-sama mengkaji penerapan disiplin positif	Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus ke deskripsi langkah kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif, bukan hanya kesepakatan kelas.

³⁴ Rijal, A., Affandi, I., Kosasih, A., & Somad, M. A., “Internalisasi Nilai Karakter Disiplin Untuk Menumbuhkan Budaya Positif di Lingkungan Sekolah”. *Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, Vol 7(2) (2023) 332-345.

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
	kualitatif.	disiplinnya. Disiplin belajar siswa mulai meningkat ditandai dengan perilaku disiplin positif yang mulai ditunjukkan siswa		
2	“Kebijakan Sekolah Dalam Penerapan Karakter Disiplin Siswa Di SDN 77 Rejang Lebong” , Septi Yani dkk, 2020, Metode deskriptif kualitatif.	Penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan pendidikan karakter disiplin diintegrasikan dalam mata pelajaran dengan ketentuan sesuai dengan materi dan tujuan yang akan dicapai dan Budaya sekolah yang meliputi budaya kelas, budaya kelas, yaitu budaya yang berkenaan dengan penerapan pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab yang terlihat dari kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di dalam kelas dan maupun di luar kelas	Jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, yakni memiliki kajian yang sama yaitu menganalisis kebijakan sekolah mengenai penerapan disiplin siswa.	Perbedaannya dengan penelitian penulis lebih kepada tahapan kepala sekolah dalam membuat kebijakan mengenai penerapan disiplin positif dan efektifitasnya.
3	“Implementasi Disiplin Positif di SD/MI” , Laesti Nurishlah, dkk, 2022, Metode kualitatif kajian pustaka.	Penelitian ini menjelaskan bahwa disiplin positif memberikan manfaat yang signifikan bagi guru dan siswa di SD/MI, membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi, dan memberdayakan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dan melibatkan semua	Jurnal ini memiliki relevansi dengan penelitian penulis, yakni mengenai penerapan disiplin positif di sekolah dasar.	Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu studi kasus, aspek kajiannya yaitu bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan pendekatan disiplin positif.

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
		pemangku kepentingan secara aktif, sekolah dapat berhasil menerapkan disiplin positif dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memotivasi, dan mendukung bagi semua siswa.		
4	<p>“Kebijakan dan Aturan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Kedisiplinan Peserta Didik di SMAN 2 Dompu”, Mujiono Sang Putra, 2019, Metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>Penelitian ini menggambarkan kebijakan sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan peserta didik SMAN 2 Dompu pada dasarnya sekolah telah menerapkan tata tertib dan peraturan sekolah yang tertuang dalam tata tertib dan peraturan sekolah. Tata tertib dan peraturan sekolah tersebut disosialisasikan kepada guru, staf tata usaha, dan karyawan. Kebijakan tata tertib dan peraturan sekolah bertujuan untuk menepis dan membuat efek jera peserta didik dengan memberikan bentuk sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik.</p>	<p>Relevansinya dengan penelitian penulis, yakni tentang kebijakan sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu lebih kepada tahapan kepala sekolah dalam membuat kebijakan dalam menerapkan disiplin positif (bukan tata tertib dan hukuman).</p>
5	<p>“Internalisasi Nilai Karakter Disiplin Untuk Menumbuhkan Budaya Positif di Lingkungan Sekolah di SD Negeri 11 and</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan karakter disiplin untuk menumbuhkan budaya sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dengan</p>	<p>Relevansi dengan penelitian penulis, yakni tentang penerapan karakter disiplin siswa</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian ini lebih pada fungsi manajemennya. Sedangkan penelitian ini</p>

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
	<p>36 Lubuklinggau”, Akmal Rijal, 2023, Metode deskriptif kualitatif.</p>	<p>manajemen <i>Planning</i> (Perencanaan), <i>Organizing</i> (Pengorganisasian), <i>Actuating</i> (Pelaksanaan), dan <i>Controlling</i> (Pengawasan). perencanaan program kedisiplinan yaitu dengan melibatkan seluruh guru, orang tua dan komite sekolah sehingga kendala- kendala yang ada dalam pelaksanaan dapat diatasi, perencanaan ini memuat atau menyesuaikan visi, misi dan tujuan sekolah. Kemudian menurut kepala sekolah langkah kedua yaitu melakukan pengorganisasian program disiplin sekolah perlu dilakukan untuk mensosialisasikan hasil penyusunan tata tertib yang telah disepakati bersama. Penerapan atau pelaksanaan disiplin siswa di SDN 11 Kota Lubuklinggau dilakukan dengan pendekatan penanganan masalah disiplin yaitu dengan cara memberikan pengertian terhadap maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan sehingga siswa dapat memahami keuntungan dan</p>	<p>untuk menciptakan budaya sekolah.</p>	<p>lebih berfokus pada medeskripsikan kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan displin positif siswa.</p>

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
		kerugian dari tindakannya. Langkah terakhir yaitu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh SD 11 Kota Lubuklinggau setiap setahun sekali		
6	<p>“Penerapan Disiplin Positif Dalam Pembelajaran Jarak Jauh di SMP Negeri 1 Banyumas”, Mistina Hidayati dan Abdul Wahid Bambang Suharto, 2021, Penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penerapan kesepakatan kelas berpengaruh langsung kepada guru dan murid. Secara umum penanaman disiplin positif ini memiliki pengaruh yang positif. Berdasarkan hasil penelitian, kedisiplinan murid juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dilihat dari dokumen nilai tugas dan respon presensi di <i>google form</i> melalui <i>classroom</i> sebesar 86% mengumpulkan tugas tepat waktu dan 90% presensi tepat waktu. Hasil angket dengan murid melalui <i>Google Form</i> yang dibagikan guru terkait penerapan disiplin positif juga mendapatkan respon yang sangat baik, yaitu sebesar 96,73 % murid menanggapi positif.</p>	<p>Relevansinya dengan penelitian penulis, yakni sama-sama dalam hal menerapkan disiplin positif siswa.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus pada Langkah kebijakan oleh kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif siswa.</p>
7	<p>“Penerapan Metode Disiplin Positif Sebagai Bentuk Pembinaan Pendidikan Karakter</p>	<p>Melalui metode pengajaran disiplin positif memberikan alternatif pada guru dan pendidik untuk menerapkan pendidikan tanpa kekerasan.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang penerapan disiplin positif</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian ini adalah kualitatif studi kasus yang berfokus pada</p>

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
	<p>Disiplin Anak SD", Efi Ika Febriandari, 2018, Penelitian kualitatif studi pustaka.</p>	<p>Disiplin positif memberikan alternatif serta strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pendidik dalam melakukan tugas sehari-hari bersama anak. Dengan penerapan metode disiplin positif mendisiplinkan anak tanpa hukuman dan kekerasan dapat memberikan pembinaan terhadap pendidikan karakter anak SD. Guru dapat menerapkan disiplin kepada anak dengan menguatkan perilaku positif, sehingga anak dapat bertanggung jawab atas perilakunya sendiri tanpa merasa dipaksa.</p>		<p>deskriptif kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan disiplin positif,</p>
8	<p>"Analisis Penerapan Karakter Disiplin Positif Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar", Dwi Enik Nuzul Chodariyah, dkk, 2024, penelitian deskriptif kualitatif</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan karakter disiplin positif pada siswa kelas satu. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah siswa kelas 1 SDN Muntilan. Data penelitian Retersebut diolah dengan menggunakan teori disiplin positif analisis dari peneliti. Peneliti menguji apakah penerapan dapat diterima oleh murid dengan baik atau tidak. Perolehan data murid</p>	<p>Relevansinya, yakni sama-sama objek penelitiannya tentang penerapan disiplin positif.</p>	<p>Perbedaanya, penelitian ini fokus pada bagaimana kebijakan kepala sekolah dalam upaya menerapkan disiplin positif.</p>

No	Judul, Penulis, Tahun, Metode	Isi	Relevansi	Perbedaan
		yang mampu mentaati peraturan menunjukkan lebih dari 50%. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan yang dilakukan guru kelas 1 mampu menolong murid memiliki sikap disiplin.		

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai topik yang akan dibahas serta menghindari kesalahpahaman terkait penelitian yang mencerminkan judulnya, penulis akan menjelaskan beberapa istilah penting, sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan organisasi yang bersangkutan. Keputusan disini adalah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau “tidak mengurus isu terkait”.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan bermakna kepandaian, kemahiran, atau kebijaksanaan. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya).³⁶

Peneliti memahami kebijakan merupakan keputusan hasil dari pemikiran seseorang yang memiliki pengaruh dalam mengambil sikap hasil dari rangkaian yang direncanakan baik secara individu maupun kelompok dalam struktur organisasi formal maupun non formal.

³⁵ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 184.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/bijak>. (diakses tanggal 29 Maret 2024)

2. Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan seseorang yang memiliki pengaruh terhadap organisasi sekolah yang dipimpinnya yaitu dengan proses mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan para anggotanya agar melakukan perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan.³⁷

Kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga formal dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam kekuasaan dan kewenangan kepala sekolah. Seorang kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Disiplin Positif

Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah.³⁸ Disiplin positif adalah sebuah pendekatan dalam upaya mendisiplinkan siswa secara intrinsik atau kesadaran diri yang dibentuk oleh nilai-nilai kebajikan yang dipercaya sehingga memunculkan tindakan atau perilaku yang konsisten.

Disiplin positif juga diartikan sebagai cara mendisiplinkan peserta didik dengan cara komunikasi tentang keyakinan dan konsekuensi logis melalui sikap tanggung jawab, empati, dan sopan.³⁹ Disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa. Disiplin biasa yang umumnya dikenal sering diidentikan dengan sangsi atau hukuman bahkan penghargaan atau hadiah.

4. Sekolah Penggerak

³⁷ Engkoswara, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 178.

³⁸ Kemendikbud, *Seri Pendidikan Orang Tua: Disiplin Positif* (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2017), 3.

³⁹ Sumantri, Endang, and Dasim Budimansyah. "Penerapan Disiplin Positif dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah." *Jurnal Civicus* 20.1 (2020): 40-50.

Program Sekolah Penggerak (PSP) adalah program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek Nomor 162 tahun 2021 sebagai payung hukumnya bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan dan menjadi sekolah model dalam implementasi kurikulum merdeka belajar sekaligus dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga.⁴⁰



⁴⁰ Mendikbudristek, *Program Sekolah Penggerak*, (Kemendikbudristek Nomor 126 Tahun 2021), 2.